



**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2020

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. JEND. SUDIRMAN NO.18 TELEPON (0532) 21195

KATA PENGANTAR

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang baik, Transparan, Akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 yang memuat kebijakan dibidang belanja selama 1 (satu) tahun, merupakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah disusun ini berdasarkan hasil evaluasi dan telaahan terhadap Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa pertengahan tahun 2020 (triwulan II) untuk mengakomodasi kebutuhan riil dalam program dan kegiatan, sesuai dengan maksud dan tujuan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini disampaikan berdasarkan Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 050/307/Bapp-IV/2020 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renja-SKPD Tahun 2020.

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui dan bahan seperlunya.

Pangkalan Bun, Juni 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB.KTW.BARAT**



MARWOTO, SIP

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19640428 198603 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana KerjaSatuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan kerangka acuan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu Kepala Daerah terpilih berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah khususnya pada tahun 2020, dimana program dan kegiatan yang direncanakan merupakan urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan / kapasitas keuangan daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamatkan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dapat dilakukan perubahan Renja agar dapat diselaraskan dan disesuaikan secara substansial dan normatif.

Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan program dan kegiatan yang ditampung dalam suatu Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja Perubahan ini juga harus mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja(Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2107 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 06);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);
25. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

▪ Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi pimpinan dan jajaran staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terhadap program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Kotawaringin Barat baik secara internal maupun eksternal yang dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tahunan oleh masing-masing bagian dan bidang yaitu bagian sekretariat, bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bidang politik dalam negeri, bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan ormasserta bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

▪ Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah untuk :

- a. Mewujudkan kesamaan sikap, pandangan dan komitmen bersama guna memberikan yang terbaik bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, sesuai dengan visi misi kepala daerah, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.
- b. Agar perencanaan kegiatan dan program lebih terarah dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

- c. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dalam mengalokasikan anggaran (penganggaran) sehingga dapat mengoptimalkan Program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Dokumen Perubahan RenjaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Tahun Berkenaan (Triwulan II)

BAB III.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 (Triwulan II)

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan capaian Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 ada beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan dikarenakan Rasionalisasi dan realokasi/refocusing anggaran untuk meningkatkan kapasitas terkait penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial/*sosial safety net* yang dibutuhkan untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan pandemi Covid-19, selain itu juga adanya pergeseran anggaran antar kegiatan guna mengoptimalkan capaian kinerja program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun 2020 yang berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan II menjadi tolok ukur dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan-SKPD) Tahun 2020.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun 2020 dilihat pada lampiran ***Tabel*** berikut.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II
Tahun Anggaran 2020

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun n-1)	Target Kinerja Renja Tahun 2020 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2020 (Tahun n)		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2020 (tahun n)	
						Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9=5+7	10=9/4
	Urusan Wajib								
5.2	Belanja Langsung								
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	90%	90%	45%	50,00	135	150
1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	-	12 paket	-	-	-	12 paket	0
1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00	18 bulan	150

1.05.1.05.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	-	7 unit	-	-	-	7 unit	0
1.05.1.05.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	6 bulan	50,00	18 bln	150
1.05.1.05.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	6 bulan	50,00	18 bln	150
1.05.1.05.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	18 unit	22 unit/thn	8 unit/thn	8 unit/thn	100,00	30 unit	166,67
1.05.1.05.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor.	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	40 jenis	52 jenis	40 jenis	40 jenis	100,00	92 jenis	230
1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah barang cetakan yang disediakan danJumlah penggandaan yang disediakan	7 jenis dan 102.200 lbr	12 jenis dan 114.625 lbr	7 jenis dan 50200 lbr	7 jenis dan 25100 lbr	50,00	19 jenis dan 139.725	271,43 dan 136,72
1.05.1.05.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	7 jenis	6 jenis	-	0,00	7 jenis	100
1.05.1.05.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan	20 unit	36 unit/bh	20 buah	-	0,00	36 unit/bh	180
1.05.1.05.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 unit	2 unit	-	-	-	2 unit	100
1.05.1.05.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	300 org	180 org/kali	150 org/kali	-	0,00	180 org/kali	60
1.05.1.05.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	186 kali	140 org/kali	31 kali	14 kali	45,16	154 org/kali	82,80
1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	90%	90%	45%	50,00	135	150 %

1.05.1.05.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	-	1 paket	-	-	-	1 paket	0,00
1.05.1.05.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 unit	3 unit	-	-	-	3 unit	150
1.05.1.05.02.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	2 unit	2 buah	-	-	-	2buah	100
1.05.1.05.02.02.13	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	3500M2	1 unit	-	0,00	3500M2	100
1.05.1.05.02.02.15	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 unit	8 unit/thn	3 unit/thn	2 unit/thn	66,67	10 unit	125
1.05.1.05.02.02.17	Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	-	8 unit	-	-	-	8 unit	0
1.05.1.05.02.02.19	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 unit	2 unit	6 unit	-	0,00	2 unit	20
1.05.1.05.02.02.23	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 unit/thn	1 paket	1 unit	1 unit	100,00	2 unit	200
1.05.1.05.02.03	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur.</i>	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	90%	90%	0%	0%	0,00	90	100 %
1.05.1.05.02.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi (fingerprint) yang diadakan	-	-	-	-	-	-	0,00
1.05.1.05.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	31 stell	33 stell dan 7 buah	-	-	-	33 stell dan 7 buah	106,45
1.05.1.05.02.03.05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	31 stell	33 stell	-	-	-	33 stell	106,45

<i>1.05.1.05.02.04</i>	Program Fasilitas pindah purna tugas PNS	Persentase Pemenuhan Layanan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	-	-	-	-	-	-	-
<i>1.05.1.05.02.04.01</i>	Pemulangan pegawai yang pensiun.	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	-	-	-	-	-	-	-
<i>1.05.1.05.02.05</i>	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	90%	70%	90%	90%	100	160	177,78
1.05.1.05.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	6 org/kali	27 org	1 org/kali	1 org/kali	100	28 org	466,67
<i>1.05.1.05.02.06</i>	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.</i>	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	90%	90%	90%	90%	100	180	200
1.05.1.05.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 laporan	-	-	-	-	-	0
1.05.1.05.02.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran.	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 laporan	-	-	-	-	-	0
1.05.1.05.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	2 laporan	200
<i>1.05.1.05.02.20</i>	<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.</i>	<i>Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang</i>	29,05%	35,17%	29 %	5%	17,24	40,17%	138,28

		telah dibina							
1.05.1.05.02.20.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan pembauran kebangsaan	50 org	100 org	-	-	-	100 orang	200
1.05.1.05.02.20.03	Peningkatan kesedaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai dan Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB)	350 org	470 org	350 orang	300 orang	85,71	770 org	220
1.05.1.05.02.21	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah forum etnis dan agama yang menjadi mitra kerja Badan Kesbangpol	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.02.21.01	Fasilitas pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah anggota forum lintas agama yg mengikuti pertemuan pengembangan wawasan kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.02.21.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta seminar wawasan kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.02.22	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantrantibmas	8 instansi	8 instansi	8 instansi	4 instansi	50	12 instansi	150
1.05.1.05.02.22.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.	Jumlah patroli keamanan intansi vertikal (aparat keamanan daerah) dalam rangka cipta kondisi	36 kegiatan	36 kegiatan	36 kegiatan	18 kegiatan	50	54 instansi	150

		keamanan daerah							
1.05.1.05.02.22.03	Pencegahan dan penanganan konflik sosial	Jumlah laporan rencana aksi daerah (RAD)	30 laporan	30 laporan	15 laporan	7 laporan	46,67	37 laporan	123,33
1.05.1.05.02.23	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pemahaman politik masyarakat	30,63%	12,97%	-	-	-	12,97%	42,34 %
1.05.1.05.02.23.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat	200 org	120 org/kali	-	-	-	120 org/kali	60
1.05.1.05.02.23.02	Forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan bantuan parpol dlm rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban parpol	30 org	30 org	-	-	-	30 org	100
1.05.1.05.02.24	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina	54%	38,46%	-	-	-	38,46%	71,22 %
1.05.1.05.02.24.01	Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan/sosialisasi tentang ormas dan LSM	140 org	100 org	-	-	-	100 org	71,43
1.05.1.05.02.24.02	Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM	Jumlah laporan hasil monev Ormas dan LSM	6 laporan	6 lap/ 1kali	-	-	-	6 lap/ 1kali	100

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 memerlukan beberapa perubahan dan pergeseran pada program / kegiatan baik antar kegiatan, pergeseran anggaran, maupun penambahan/pengurangan target kinerja dalam rangka mencapai hasil yang lebih optimal dalam pelaksanaan program / kegiatan dan secara keseluruhan pagu Belanja langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2020 mengalami penambahan anggaran pasca rasionalisasi dan realokasi/refocusing anggaran untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan pandemi Covid-19, yaitu anggaran untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Desk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Adapun pagu belanja langsung (BL) pada program dan kegiatan yang mengalami perubahan dapat dilihat pada *Tabel* berikut dibawah ini :

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2020

Kabupaten Kotawaringin Barat

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020(Tahun berjalan)											SKPD Penanggung Jawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubah an	Setelah Perubah an	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
5.2	Belanja Langsung									2.301.648.000	1.159.276.000	(1.142.372.000)			
1.05.1.05.0 2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					90%	90%	633.813.300	442.347.500	(191.455.800)			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.0 2.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Badan Kesbanpol	Badan Kesbanpol	12 bulan	12 bulan	64.320.000	64.320.000	0,00	APBD	APBD	

1.05.1.05.0 2.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	12 bulan	12 bulan	141.113.300	128.143.300	(12.970.000)	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	12 bulan	12 bulan	48.000.000	42.000.000	(6.000.000)	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Peralatan kerja	Peralatan kerja	Bakesbang pol	Bakesbang pol	18 unit/thn	8 unit/thn	15.380.000	6.720.000	(8.660.000)	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol	40 jenis	40 jenis	47.500.000	27.039.250	(20.460.750)	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	7 jenis	7 jenis	40.000.000	21.600.000	(18.400.000)	APBD	APBD	
		Jumlah penggandaan yang disediakan	Jumlah penggandaan yang disediakan					102200 lbr	50200 lbr						

1.05.1.05.0 2.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	7 jenis	6 jenis	7.000.000	5.474.950	(1.525.050)	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantoryang disediakan	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	20 buah	20 buah	5.000.000	5.000.000	0,00	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Bakesbang pol	-	2 unit	-	1.000.000	0,00	(1.000.000)	APBD		
1.05.1.05.0 2.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Barat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	300 org	470 org/kali	4.500.000	7.050.000	2.550.000	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbang pol	Bakesbang pol	57 kali	31 kali	260.000.000	135.000.000	(125.000.000)	APBD	APBD	

		konsultasi ke luar daerah	konsultasi ke luar daerah	Kab.Ktw.Ba rat	Kab.Ktw.Ba rat										
1.05.1.05.0 2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					90%	90%	148.350.000	133.250.000	(15.100.000)	APBD	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.0 2.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	Jumlah peralangka n gedung kantor yang diadakan	-	Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	12 buah	-	4.800.000	4.800.000	-	APBD	
1.05.1.05.0 2.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	2 unit	-	10.000.000	0,00	(10.000.000)	APBD		
1.05.1.05.0 2.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Jumlah mebeleur yang diadakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	2 unit	-	10.000.000	0,00	(10.000.000)	APBD		

1.05.1.05.0 2.02.13	Pemeliharaan ruitn/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	1 unit	2 unit	5.000.000	7.500.000	2.500.000	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasi onal yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasi onal yang dipelihara	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	3 unit/thn	3 unit/thn	17.000.000	17.000.000	0,00	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	Bakesbang pol	Bakesbang pol	10 unit	6 unit	6.350.000	3.950.000	(2.400.000)	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.02.23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Bangunan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Bangunan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	1 unit	1 unit	100.000.000	100.000.000	00,0	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas					90%	90%	63.000.000	10.311.500	(52.688.500)			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Sumber Daya Aparatur	Sumber Daya Aparatur												
1.05.1.05.0 2.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	6 org/kali	1 org/kali	63.000.000	10.311.500	(52.688.500)	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.06	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.</i>	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					90%	90%	22.500.000	20.500.000	(2.000.000)	APBD	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.0 2.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	1 laporan	-	500.000	-	(500.000)	APBD		

1.05.1.05.0 2.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran.	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	1 laporan	-	500.000	-	(500.000)	APBD		
1.05.1.05.0 2.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Ktw.Ba rat	Bakesbang pol	Bakesbang pol	1 laporan	1 laporan	21.500.000	20.500.000	(1.000.000)	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.20	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina					29 %	29 %	621.858.000	246.035.000	(375.823.000)	APBD	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.0 2.20.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/pe nyuluhan pembauran kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi/pe nyuluhan pembauran kebangsaan	Kades/Lura h, Demang/Ke pala Adat, Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama dan Tokoh Lintas Etnis di	Kades/Lura h, Demang/Ke pala Adat, Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama dan Tokoh Lintas Etnis di	Kec. P.Banteng	Kec. P.Banteng	50 orang	-	378.370.000	174.370.000	(204.000.000)	APBD	APBD	

				Kec.P.Bante ng	Kec.P.Bante ng										
	Sub kegiatan: Peningkatan Rasa Solidaritas Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah laporan kegiatan anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah laporan kegiatan anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Anggota Forum Pembauran Kebangsaa n (FPK)	Anggota Forum Pembauran Kebangsaa n (FPK)	Arut Selatan	Arut Selatan	6 Laporan	6 Laporan	204.200.000	146.860.000	(57.340.000)	APBD	APBD	
	Sub kegiatan: Peningkatan Rasa Solidaritas Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah laporan kegiatan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah laporan kegiatan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kab.Ktw.Ba rat	Kab.Ktw.Ba rat	6 Laporan	6 Laporan	149.800.000	27.510.000	(122.290.000)	APBD	APBD	
	Sub kegiatan: Penyuluhan FKUB dan FPK	Jumlah peserta sosialisasi/pe nyuluhan pembauran kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi/pe nyuluhan pembauran kebangsaan	Kades/Lura h, Demang/Ke pala Adat, Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama dan	Kades/Lura h, Demang/Ke pala Adat, Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama dan	Kec. P.Banteng	Kec. P.Banteng	50 orang	-	24.370.000	0,00	(24.370.000)	APBD		

				Tokoh Lintas Etnis di Kec.P.Bante ng	Tokoh Lintas Etnis di Kec.P.Bante ng											
1.05.1.05.0 2.20.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai dan Jumlah pemuda- pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB)	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai dan Jumlah pemuda- pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB)	Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Kumai, Pemuda dan Pelajar Kotawaring in Barat	Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Kumai, Pemuda dan Pelajar Kotawaring in Barat	Kumai, Kab. Kotawaring in Barat, Kalimantan Tengah	Kumai, Kab. Kotawaring in Barat, Kalimantan Tengah	350 orang	350 orang	243.488.000	71.665.000	(171.823.000)	APBD	APBD		

	Sub Kegiatan : Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Kumai	Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Kumai	Kumai, Kab. Kotawaring in Barat	Kumai, Kab. Kotawaring in Barat	300 orang	300 orang	156.313.000	71.665.000	(84.648.000)	APBD	APBD	
	Sub Kegiatan : Mengikuti Ikrar Bersama Anak Bangsa	Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB)	Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB)	Pemuda dan Pelajar Kotawaring in Barat	Pemuda dan Pelajar Kotawaring in Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	50 orang	-	87.175.000	0,00	(87.175.000)	APBD		
1.05.1.05.0 2.22	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga					8 instansi	8 instansi	505.270.000	266.182.000	(239.088.000)	APBD	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		kantramtibmas	kantramtibmas												
1.05.1.05.0 2.22.01	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.	Jumlah patroli keamanan intansi vertikal (aparat keamanan daerah) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Jumlah patroli keamanan intansi vertikal (aparat keamanan daerah) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Kotawaring in Barat	Kotawaring in Barat	36 kegiatan	36 kegiatan	413.120.000	240.775.000	(172.345.000)	APBD	APBD	
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Jumlah kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Tim Kewaspadaan Pemda	Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Tim Kewaspadaan Pemda	Kotawaring in Barat	Kotawaring in Barat	3 kegiatan	3 kegiatan	24.350.000	20.025.000	(4.325.000)	APBD	APBD	

	Sub Kegiatan: Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Tim Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing)	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Tim Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing)	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Tim Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing)	Tim Pemantaua n Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	Tim Pemantaua n Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	Kab.Ktw.Ba rat	Kab.Ktw.Ba rat	1 kegiatan	-	22.0000.000	0,00	(22.0000.000)	APBD		
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Instansi Vertikal)	Jumlah patroli keamanan intansi vertikal (aparat keamanan daerah) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Jumlah patroli keamanan intansi vertikal (aparat keamanan daerah) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal)	Kotawaring in Barat	Kotawaring in Barat	36 kegiatan	36 kegiatan	366.770.000	220.750.000	(146.020.000)	APBD	APBD	

1.05.1.05.0 2.22.03	Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan rencana aksi daerah (RAD)	Jumlah laporan rencana aksi daerah (RAD)	Aparat keamanan daerah lintas sektor se-Kab.Ktw.Ba rat	Aparat keamanan daerah lintas sektor se-Kab.Ktw.Ba rat	Kab.Ktw.Ba rat	Kab.Ktw.Ba rat	30 laporan	15 laporan	92.150.000	25.407.000	(66.743.000)	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.23	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	Persentase pemahaman politik masyarakat	Persentase pemahaman politik masyarakat					31%	31%	208.300.000	40.650.000	(167.650.000)	APBD	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.0 2.23.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/pe nyuluhan politik masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/pe nyuluhan politik masyarakat	Masyarakat , tokoh adat/masya rakat dan anggota Parpol se Kotawaring in Barat	Masyarakat , tokoh adat/masya rakat dan anggota Parpol se Kotawaring in Barat	Pangkalan Lada, Kotawaring in Lama	Pangkalan Lada, Kotawaring in Lama	200 orang	-	184.145.000	40.650.000	(143.495.000)	APBD	APBD	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/pe nyuluhan politik masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi/pe nyuluhan politik masyarakat	Masyarakat , tokoh adat/masya rakat dan anggota Parpol se Kotawaring in Barat	Masyarakat , tokoh adat/masya rakat dan anggota Parpol se Kotawaring in Barat	Pangkalan Lada, Kotawaring in Lama	Pangkalan Lada, Kotawaring in Lama	200 orang	-	84.080.000	0,00	(84.080.000)	APBD		

	Sub Kegiatan: Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)	Masyarakat , tokoh adat/masya rakat dan anggota Parpol se Kotawaring in Barat	Masyarakat , tokoh adat/masya rakat dan anggota Parpol se Kotawaring in Barat	Kab.Ktw.Ba rat	Kab.Ktw.Ba rat	200 orang	42 orang	100.065.000	40.650.000	(59.415.000)	APBD	APBD	
1.05.1.05.0 2.23.02	Forum-forum diskusi politik.	Jumlah peserta sosialisasi/pel atihan bantuan parpol dlm rangka penyusunan Laporan Pertanggungj awaban parpol	Jumlah peserta sosialisasi/pel atihan bantuan parpol dlm rangka penyusunan Laporan Pertanggungj awaban parpol	Partai politik	Partai politik	Kab.Ktw.Ba rat	Kab.Ktw.Ba rat	30 org	-	24.155.000	0.00	(24.155.000)	APBD		
	Sub Kegiatan: Verifikasi Bantuan keuangan/hibah kepada Partai Politik	Jumlah kegiatan Verifikasi Bantuan keuangan/hib ah kepada Partai Politik	Jumlah kegiatan Verifikasi Bantuan keuangan/hib ah kepada Partai Politik	Partai politik	Partai politik	Kotawaring in Barat	Kotawaring in Barat	4 kegiatan	-	4.900.000	0.00	(4.900.000)	APBD		

	Sub Kegiatan: Sosialisasi/Pelatihan penyusunan LPJ Banpol dan verifikasi laporan keuangan Partai Politik	Jumlah peserta sosialisasi /pelatihan bantuan parpol dlm rangka penyusunan Laporan Pertanggungj awaban parpol	Jumlah peserta sosialisasi /pelatihan bantuan parpol dlm rangka penyusunan Laporan Pertanggungj awaban parpol	Partai politik	Partai politik	Kab.Ktw.Ba rat	Kab.Ktw.Ba rat	30 org	-	19.255.000	0,00	(19.255.000)	APBD		
1.05.1.05.0 2.24	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina					54%	0%	98.556.700	0,00	(98.556.700)	APBD		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.0 2.24.01	Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan/s osialisasi tentang ormas dan LSM	Jumlah peserta penyuluhan/s osialisasi tentang ormas dan LSM	Tokoh masyarakat dan ormas/LSM di Kec.Kumai	Tokoh masyarakat dan ormas/LSM di Kec.Kumai	P.Lada	P.Lada	140 org	-	58.224.700	0,00	(58.224.700)	APBD		
	Sub Kegiatan: Sosialisasi tentang Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta penyuluhan/s osialisasi tentang	Jumlah peserta penyuluhan/s osialisasi tentang	Tokoh masyarakat dan ormas/LSM di	Tokoh masyarakat dan ormas/LSM di	P.Lada	P.Lada	140 org	-	47.024.700	0,00	(47.024.700)	APBD		

		Ormas/LSM	Ormas/LSM	Kec.Kumai	Kec.Kumai										
	Sub Kegiatan: Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga swadaya Masyarakat	Jumlah kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga swadaya Masyarakat	Jumlah kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga swadaya Masyarakat	Tokoh masyarakat dan ormas/LSM	Tokoh masyarakat dan ormas/LSM	Kab.Ktw.Ba rat	Kab.Ktw.Ba rat	2 kegiatan	-	11.200.000	0,00	(1.200.000)			
1.05.1.05.0 2.24.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas dan LSM	Jumlah laporan hasil monev Ormas dan LSM	Jumlah laporan hasil monev Ormas dan LSM	Organisasi Kemasyara katan dan LSM	Organisasi Kemasyara katan dan LSM	Kotawaring in Barat	Kotawaring in Barat	6 laporan	-	40.332.000	0,00	(40.332.000)	APBD		

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2020

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT
 PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Program/Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
	Semula	Menjadi		RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	RKPD 2020	RKPD 2020 Perubahan	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	90%	633.813.300,00	442.347.500,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12 bulan	12 bulan	64.320.000,00	64.320.000,00	-
	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	141.113.300,00	128.143.300,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD dan Penambahan dan Pengurangan Anggaran Hanya Untuk Pergeseran Antar Rekening Belanja
	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	48.000.000,00	42.000.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD

	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	18 unit/thn	8 unit/thn	15.380.000,00	6.720.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Penyediaan alat tulis kantor.	Penyediaan alat tulis kantor.	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	40 jenis	40 jenis	47.500.000,00	27.039.250,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah barang cetakan yang disediakan / jenis dan Jumlah penggandaan yang disediakan	7 jenis dan 102.200 lbr	7 jenis dan 50.200 lbr	40.000.000,00	21.600.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	6 jenis	7.000.000,00	5.474.950,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 unit/bh	20 buah	5.000.000,00	5.000.000,00	-
	Penyediaan peralatan rumah tangga	-	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 unit	-	1.000.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	300 org/kali	470 org/kali	4.500.000,00	7.050.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD dan Penambahan Kembali Anggaran Makan Minum Rapat
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	57 kali	31 kali	260.000.000,00	135.000.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	148.350.000,00	133.250.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD

		-Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	12 buah	0,00	4.800.000,00	Penambahan Rekening Belanja Bendera/Umbul-Umbul Lama yang Sudah Usang
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 unit	-	10.000.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Pengadaan Mebeleur	-	Jumlah mebeleur yang diadakan	2 unit	-	10.000.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	2 unit	5.000.000,00	7.500.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD dan Penambahan Anggaran Untuk Instalansi (Pembagian Daya) Listrik
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 unit/thn	3 unit/thn	17.000.000,00	17.000.000,00	-
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 unit	6 unit	6.350.000,00	3.950.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 unit	1 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90%	90%	63.000.000,00	10.311.500,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD

	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	6 orang/kali	6 orang/kali	63.000.000,00	10.311.500,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90%	90%	22.500.000,00	20.500.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	-	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 laporan	-	500.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Penyusunan laporan keuangan semesteran.	-	Jumlah laporan keuangan semesteran disusun	1 laporan	-	500.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun disusun	1 laporan	1 laporan	21.500.000,00	20.500.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina	29%	29%	621.858.000,00	246.035.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat.	-	-	-	378.370.000,00	174.370.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD

Sub Kegiatan: Peningkatan Rasa Solidaritas Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Sub Kegiatan: Peningkatan Rasa Solidaritas Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Laporan kegiatan anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	6 laporan	6 laporan	204.200.000,00	146.860.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD dan Hanya Pergeseran Anggaran Belanja Antar Sub Kegiatan
Sub kegiatan: Peningkatan Rasa Solidaritas Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Sub kegiatan: Peningkatan Rasa Solidaritas Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah laporan kegiatan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	6 laporan	6 laporan	149.800.000,00	27.510.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD dan Hanya Pergeseran Anggaran Belanja Antar Sub Kegiatan
Sub kegiatan: Penyuluhan FKUB dan FPK	-	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan pembauran kebangsaan	50 orang	-	24.370.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-	-	-	243.488.000,00	71.665.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
Sub Kegiatan :Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Sub Kegiatan :Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	300 org	300 org	156.313.000,00	71.665.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD dan Pergeseran Anggaran antar Rekening Belanja
Sub Kegiatan : Mengikuti Ikrar Bersama Anak Bangsa	-	Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB)	50 org	-	87.175.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD

6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas	8 instansi	8 instansi	505.270.000,00	266.182.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.	-	-	-	413.120.000,00	240.775.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Sub Kegiatan: Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Jumlah kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	3 kegiatan	3 kegiatan	24.350.000,00	20.025.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Tim Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing)	-	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Tim Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing)	1 kegiatan	-	22.000.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Instansi Vertikal)	Sub Kegiatan: Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Instansi Vertikal)	Jumlah patroli keamanan intansi vertikal (aparat keamanan daerah) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	36 kegiatan	36 kegiatan	366.770.000,00	220.750.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD dan Hanya Pergeseran Anggaran Pada Rekening Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	Pencegahan dan penanganan konflik sosial	Pencegahan dan penanganan konflik sosial	Jumlah laporan rencana aksi daerah	30 lap.	15 lap.	92.150.000,00	25.407.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD

7	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.	Persentase pemahaman politik masyarakat	31%	31%	208.300.000,00	40.650.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Penyuluhan kepada masyarakat	Penyuluhan kepada masyarakat	-	-	-	184.145.000,00	40.650.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Sub Kegiatan: Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Masyarakat	-	Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan politik masyarakat	200 org	-	84.080.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Sub Kegiatan: Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)	Sub Kegiatan: Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)	200 org	42 orang	100.065.000,00	40.650.000,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD dan Penambahan Anggaran untuk Persiapan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2020
	Forum-forum diskusi politik	-	-	-	-	24.155.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Sub Kegiatan: Sosialisasi/Pelatihan penyusunan LPJ Banpol dan verifikasi laporan keuangan Partai Politik	-	Jumlah peserta sosialisasi /pelatihan bantuan parpol dlm rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban parpol	30 org	-	19.255.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Sub Kegiatan: Verifikasi Bantuan keuangan/hibah kepada Partai Politik	-	Jumlah kegiatan Verifikasi Bantuan keuangan/hibah kepada Partai Politik	4 kegiatan	-	4.900.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD

8	Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	-	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina	54%	0%	98.556.700,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	-	-	-	-	58.224.700,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Sub Kegiatan: Sosialisasi tentang Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan	-	Jumlah peserta penyuluhan/sosialisasi tentang Ormas/LSM yang dibina	140 org	-	47.024.700,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Sub Kegiatan: Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga swadaya Masyarakat	-	Jumlah kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga swadaya Masyarakat	2 kegiatan	-	11.200.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
	Monitoring evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM	-	Jumlah laporan hasil monev Ormas /LSM	6 laporan	-	40.332.000,00	0,00	Rasionalisasi anggaran untuk Tahap I Penyesuaian SILPA, Tahap II Penanganan Covid-19 dan Tahap III Penyesuaian APBD
TOTAL BELANJA LANGSUNG						2.301.648.000,00	1.159.276.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai bahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 disusun sebagai pedoman dan acuan bagi semua pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 dengan tujuan target kinerja dapat tercapai dengan optimal.

Terima kasih,

Pangkalan Bun, Juni 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KAB. KTW. BARAT**



MARWOTO, SIP

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19640428 198603 1 007